BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas untuk melaksakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, memiliki sejarah sebagai berikut :

Periode sebelum Kemerdekaan, awal kelistrikan dimulai pada akhir abad ke 19. Pada saat itu beberapa perusahaan Belanda menyediakan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Sedangkan kelistrikan untuk pemanfaatan umum dimulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGM Jakarta yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya dibidang kelistrikan umum, hal ini diundang-undangkan dalam ordonansi 1890 No. 190 tanggal 13 September 1890. Selanjutnya pemerintah Belanda berdasarkan Staatblad 1927 No. 419 mendirikan Land Waterkracht Bedrijven (LWB) yaiu perusahaan listrik yang mengelola pembangkit tenaga air dan teaga uap. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, dengan demikian perusahaan listrik dan gas diambil alih oleh pemerintah Jepang. Perusahaan listrik tersebut oleh pemerintah Jepang diberi nama Denki Jyosha. Bersamaan dengan jatuhnya pemerintah Jepang ketangan sekutu, secara serentak buruh dan pemuda-pemuda Indonesia menganbil alih perusahaan listrik.

Periode 1945-1950

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan pemerintah Jepang, kemudian pada bulan September 1945 diserahkan kepada pemerintah RI dan diberi nama jawawtan listrik dan gas. Selanjutnya dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1 tanggal 27 Oktober 1945 maka jawatan listrik dan gas dimasukkan pada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Denhgan adanya agresi Belanda 1 perusahaan listrik kembali dikuasai kembali oleh pemiliknya semula. Kemudian agresi Belanda II tanggal 19 Desember 1948, sebagian jawatan listrik dan gas direbut Belanda. Selama masa kependudukan sampai waktu penarikan kembali tentara Belanda, jawatan listrik dan gas kembali ke Yogyaarta. Kemudian dengan pindahnya pusat pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, jawatan listrik dan gas pindah ke Jakarta. Sesuai dengan perkembangannya jawatan listrik dan gas menjadi listrik pada tahun 1950.

Periode 1951-1966

Jawatan Listrik dan Gas membawahi Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL) kemudian diperluas membawahi Perusahaan Negara untuk Distribusi Tenaga Listrik (PENUDITEL). Perjuangan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan perusahhan listrik dan gas swasta dengan dikeluarkannya keputusan Presiden RI No. 163 tanggal 3 Oktober 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda kembali kepada pemerintah Indonesia.

Periode 1967-1985

Berdasarkan SK Mentri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No. f25/45/17 tanggal 23 September 1958 jawatan tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara. Pada tahun 1972 terbit Peratyran Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang memberikan tugas pemerintah dibidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugasnya sebagai perusahaan. Dalam kabinet pembangunan III yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 15 tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978 Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi sehingga pelaksanaan tugas dibidang energi termasuk listrik ada dibawah lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.

Berdirinya Perum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat

Semula PLN Distribusi Jawa Barat bernama GEBEO yang merupakan nama pihak pemerintah Belanda dan pada tahun 1967 diganti dengan nama Perusahaan Umum Listrik Negara Exploitasi. Tugasnya adalah melaksanakan/mengusahakan Distribusi III yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Jawa Barat kecuali tanggerang. PLN Jawa Barat meliputi daerah Banten, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Cimahi, Bandung, Majalaya, Cirebon dan berkantor pusat di kantor Distribusi Jawa Barat Bandung. Pada tahun 1975 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 08/PRT/1975 tentang organisasi tata kerja Perum Listrik Negara mengadakan reorganisasi yang menyangkut nama, tujuan dan wilayah kerja Perum Listrik Negara di daerah. Setelah Indonesia secara berangsur-angsur merdeka pada tahun 1960, dilakukan proses pemindahan atau rasionalisasi dari

GEBEO menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang dimonopoli oleh pemerintah RI berdasarkan UUD 1945 pasal 33 berdasarkan SK Presiden RI No. 18 tahun 1972 yang memiliki tujuan untuk membangun ekonomi dan ketahanan nasional dibidang kelistrikan untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia. Berikut peristiwa kelistrikan di Jawa Barat :



1. Masa Pemerintah Hindia-Belanda

Pada tahun 1905 berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoeng Elektricitiet Maatschappij (BEM) yang memiliki tugas membuat atau membangun jaringan listrik di Bandung dan sekitarnya. Pada tahun 1919 berdiri Land Waterkracht Bedrijven (LWB) yang tugasnya bergerak dibidang penguasaan pembangkit dan penyaluran tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Indonesia. Tahun 1919 dibuat akte pendirian perusahaan pelistrikan dihadapan Notaris MR. Adrian Hendrik dan Ophser di Batavia dengan nomor akta No. 213 tanggal 31 Desember 1919 yaitu pendirian perusahaan perseroan Gemeenschappelijk Elekctriciteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) pada tanggal 1 Januari 1920 yang menggantikan BEM.

2. Masa Pemerintahan Jepang.

Pada masa ini, pendistribusian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa Denki Djiyo Sha Sa dengan wilayah kerja diseluruh pulau jawa.sedangkan usaha pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh instansi, yaitu:

- Shal Boe Denki Djigsha pada periode 1942-1945.
- Dengki Kisha pada periode 1943-1945.

3. Masa Perjuangan Fisik

Setelah kemerdekaan 1945-1948, pada masa revolusi perjuangan fisik pelistrikan di Indonesia khususnya Jawa Barat dilaksanakan oleh RI dengan nama Jawatan Listrik.

4. Masa Agresi Militer Belanda

Tahun 1048 Belanda masuk pada pemerintahan RI untuk pindah ke Yogyakarta. Pengusahaan dan pendistribusian tenaga kerja listrik khususnya Jawa Barat termasuk Jakarta diusahakan oleh GEBEO sedangkan pembangkitan dan penyebarannya tetap dikuasai oleh pemerintah RI yaitu Perusahaan Negara Untuk Pembangkitan Listrik (PERU PETEL).

5. Masa NAsionalisasi dan sesudahnya.

Tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan milik asing, maka GEBEO diambil alih pada tanggal 27 Desember 1957. tahun 1958 dikeluarkan PP No. 86 Tahun 1958 pengganti UU No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Tahun 1959 berdasarkan PP No. 18, GEBEO di Bandung dinyatakan menjadi Perusahaan Milik Negara dengan nama PLN. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Umum Listrik Negara yang disingkat BPU PLN.

Pada tahun 1965 berdasarkan PP No. 10 Tahun 1965 dan Peraturan Mentri PU dan Tata Kerja No. 1/PRT/65 diadakan reorganisasi dimana BPU PLN dihapus. Di tingkat daerah dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut Perusahaan Listrik Negara Exploitasi XI berkedudukan di Bandung termasuk cabangnya. Tahun 1972 didalam PP No. 18 Tahun 1972 tentang Perum Listrik Negara dalam Bab I Pasal 1 Ayat 1& 2, disebutkan hal-hal yang menyangkut

status PLN yang baru yaitu PP No. 54 tahun !(81 tentang Perusahaan Listrik Negara.

Sasaran akhir Perusahaan Umum Listrik Negara yaitu: Penyediaan dan Pelayanan tenaga listrik bagi kepentingan umum secara terus menerus dan merata diseluruh wilayah hokum RI dengan keandalan mutu, keselamatan dan harga yang terjangkau masyarakat (pasal 4 Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 449/K/12 MPE 1985 tanggal 10 Mei 1985).

Tujuan PLN yaitu: Ikut serta membantu dan menetapkan ketahanan nasional di wilayah kerjanya menurut kebijaksanaan Direksi PLN dalam penyediaan tenaga listrik.

Di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1994 ditetapkan tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Milik Negara menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO) berdasarkan:

1. PP RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. SK MenKeu RI tanggal 28 Juni 1994 No. 317/KMK.016/1994 tentang penetapan modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Listrik Negara.
3. Surat MenKeu RI tanggal 28 Juni 1994 No. 353/MK/1994.
4. Keputusan Mentri Kehakiman RI No. C2-11.519.HT.01.01-TH'94.

Keputusan Mentri Kehakiman RI tentang ditetapkannya Perseroan Terbatas bagi PLN telah dituangkan kedalam lembaran Negara pada tambahan Berita Negara RI menurut pasal 38 dari buku UU perniagaan.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1994 telah ditanda tangani Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 169 oleh Notaris Sutjipto, SH. di Jakarta,

dengan nama Perusahaan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat "PT. PLN (Persero)". Akte pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. C-2-11.519HT.01.01. tanggal 1 Agustus 1994.

Maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang telah menuju kepada suatu kemantapan dalam menempuh tujuan. Dalam usahanya dimungkinkan adanya *joint venture* atau *mixed enterprise* dengan swasta nasional atau asing, disamping itu bila diperlukan PLN dapat mendirikan anak-anak perusahaan dalam penyertaan saham. Dengan demikian diharapkan tujuan restrukturisasi PLN direncanakan akan dimulai pada tahun anggaran 1994/1995. Ini untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan-tantangan pembangunan bidang ketenagalistrikan akan dapat tercapai karena PLN diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya didukung oleh tenaga-tenaga yang diprofesionalkan.

Pada Hari Kamis Tanggal 7 Desember 1995 PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mendirikan cabang PLN yaitu Ranting Sepatan dan disyahkan oleh Ir. IB Nurtjahja Manuaba selaku Direktur Pengusahaan.

Setahap demi setahap Ranting-ranting PLN semakin berkembang dengan pesat. Untuk meningkat lebih maju maka sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor 161.K/010/DIR/2000 Tanggal 05 September 2000 PT. PLN (Persero) Ranting Sepatan menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Unit Pelayanan Sepatan.

Dengan tidak mengubah tujuan dari perusahaan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan pelanggan maka pada Tahun 2003 PT. PLN

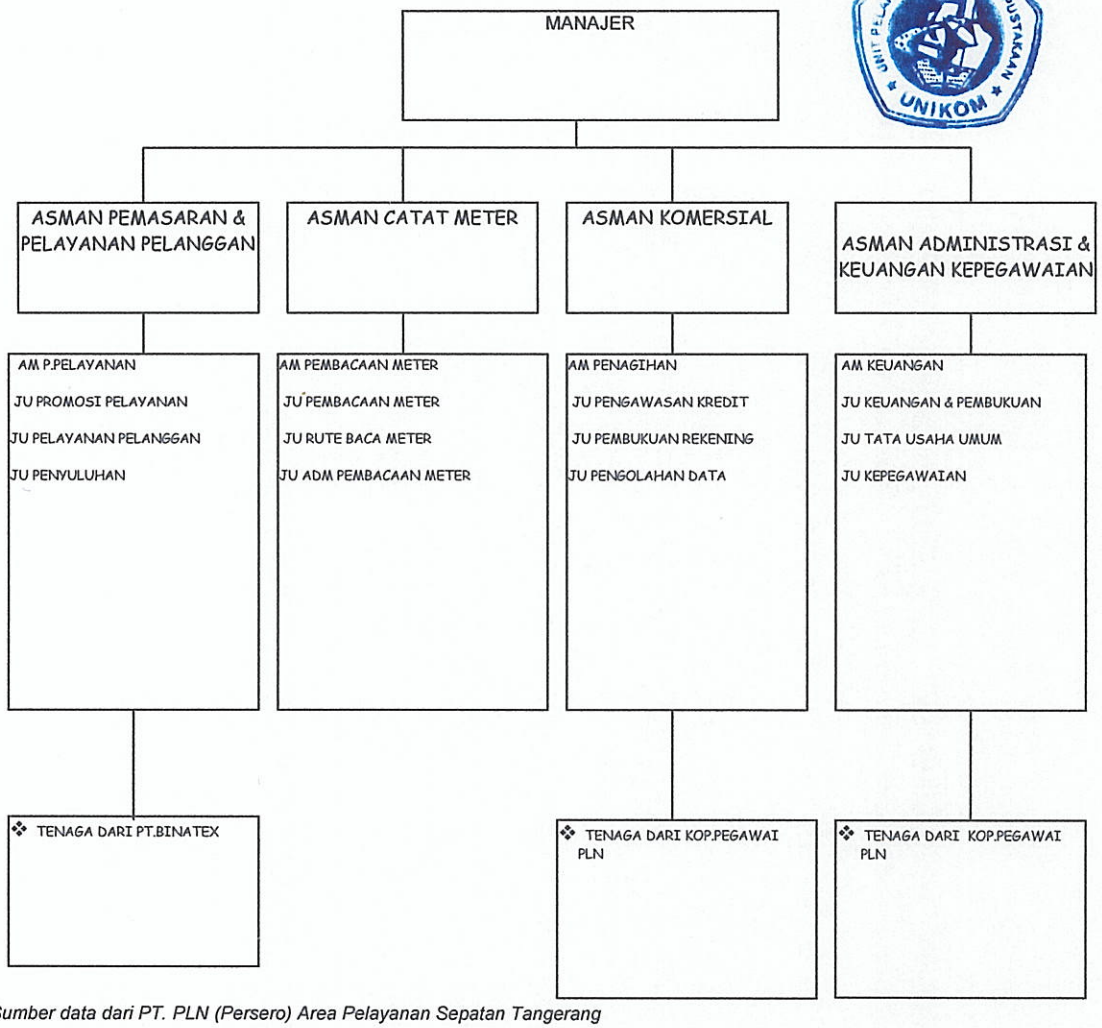
(Persero) Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Unit Pelayanan Sepatan beralih menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Area Pelayanan Sepatan sesuai dengan Keputusan Direksi.

Dengan banyaknya perubahan tetapi maksud dan tujuan PLN untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan dikatakan maju dan berkembang dengan baik semua itu diperlukan kerjasama yang baik, baik antara atasan maupun bawahan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sepatan didukung oleh seorang Manager, 23 Pegawai PLN dan dibantu oleh 10 orang tenaga Koperasi serta 3 orang tenaga dari PT. Binatex sebagai Frontlinier.

2.2 Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sepatan Tangerang berbentuk *line organization (*organisasi garis) dimana tanggung jawab berdasarkan atas perintah atau kekuasaan dari atas ke bawah melalui berbagai tingkatan kekuasaan. Selanjutnya pertanggung jawaban berjalan dari tingkat yang terendah kepada atasnya masing-masing sampai pada penangungjawaban yang paling atas. Dan setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan tertentu. Adapun struktur organisasi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sepatan Tangerang seperti terlihat pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI AREA PELAYANAN SEPATAN



Sumber data dari PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sepatan Tangerang

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian

1. Uraian Jabatan : Manajer Area Pelayanan

   Sebutan Jabatan : Manajer Area Pelayanan

   Bertanggung Jawab : General Manajer

   Bawahan Langsung :

   - Asisten Manajer Bidang Pemasaran Dan Pelayanan Pelanggan
   - Asisten Manajer Bidang Pembaca Meter

- Asisten Manajer Bidang Komersial
- Asisten Manager Bidang Administrasi Dan Keuangan

Ringkasan Tugas : Menerapkan kebijakan dan prosedur pemasaran,pelayanan, pelanggan pembacaan meter dan pembayaran/penagihan tagihan listrik mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Uraian Jabatan : Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggung Jawab : Manajer

Bawahan Langsung :

- Asisten Manajer Peningkatan Pelayanan
- Juru Utama / Juru Promosi Pemasaran
- Juru Utama / Juru Pelayan Pelanggan
- Juru Utama / Juru Penyuluhan

Ringkasan Tugas : Menjamin atas pengelolaan pemasaran dan pelayanan pada pelanggan lama maupun baru yang berhubungan penyambungan tenaga listrik, serta perubahan data pelanggan.

3. Uraian Jabatan : Asisten Manajer Pembaca Meter

Sebutan Jabatan : Asisten Manajer Pembacaan Meter

Bertanggung Jawab : Manajer

Bawahan Langsung :

- Asisten Manajer Pembacaan Meter

- Juru Utama / Juru Pembacaan Meter
- Juru Utama / Juru Rute Baca Meter
- Juru Utama / Juru Adm. Baca Meter

Ringkasan Tugas : Menjamin atas pengelolaan pemasaran dan pelayanan pada pelanggan lama maupun baru yang berhubungan penyambungan tenaga listrik, serta perubahan data pelanggan.

4. Uraian Jabatan : Asisten Manajer Komersial

Sebutan Jabatan : Asisten Manajer Komersial

Bertanggung Jawab : Manajer

Bawahan Langsung :

- Asisten Manajer Penagihan
- Juru Utama / Juru Pengawasan Kredit
- Juru Utama / Juru Pembukuan Rekening
- Juru Utama / Juru Pengolah Data

Ringkasan Tugas : Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran rekening dan piutang pelanggan.

5. Uraian Jabatan : Asisten Manajer Komersial

Sebutan Jabatan : Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan

Bertanggung Jawab : Manajer

Bawahan Langsung :

- Asisten Manajer Keuangan
- Juru Utama / Juru Keuangan dan Pembukuan
- Juru Utama / Juru Tata Usaha Umum
- Juru Utama / Juru Kepegawaian

Ringkasan Tugas : Menjamin atas penyelenggara dan pengendalian administrasi dan keuangan dengan melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan SDM, keuangan dan anggaran, akuntansi serta usaha kesektariatan dan umum termasuk kehumasan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM